

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembangunan

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11)

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk: 2011:3)

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya. (Subandi: 2011:13)

Selanjutnya Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu:

- a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*),
- b. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan

- c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekat suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Untuk mencapai “kehidupan yang serba lebih baik” semua masyarakat minimal harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut (Todaro, 2000: 28) :

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok , seperti pangan , sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil , melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

2.2. Pemberdayaan Masyarakat

Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya.

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawatan bawah. Inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi. (Wijaya : 2005:77)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya. Secara maksimal untuk bertahan untuk mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang sosial, ekonomi, agama, dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup dengan hanya upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu : akses terhadap sumber daya, teknologi, pasar dan sumber pembiayaan. Keempat akses tersebut disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama

atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan.
(Wijaya: 2004:169-170)

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sumodiningrat, 2009 : 62).

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal :

- a. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan kesadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan

- b. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat.
- c. Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan (Hikmat, 2001 : 56).

Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan biasanya diidentikan dengan memberikan bantuan uang. Tetapi banyak proyek-proyek Inpres yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat desa justru mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan. Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan langsung uang atau bantuan proyek kepada masyarakat tidak akan merangsang peran serta masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan.

Pada kasus tertentu, di dalam konsep pembangunan masyarakat, memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting adalah pengembangan swadaya masyarakat untuk membangun diri sendiri. Ciri khas dari suatu kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya

yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan (Hikmat, 2001 : 61).

2.3. Pengertian Sosial Ekonomi

2.3.1. Pengertian Sosial

Kata sosial berasal dari kata "*socius*" yang artinya kawan (teman). Dalam hal ini arti kawan bukan terbatas sebagai teman sepermainan, teman kerja dan sebagainya. Yang dimaksud teman adalah mereka yang ada disekitar kita, yakni yang tinggal dalam suatu lingkungan tertentu dan mempunyai sifat yang saling mempengaruhi.

Pengertian sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat. Sedangkan pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkupnya pekerjaan dan kesejahteraan sosial. (Moenandar 2001: 5)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (KBBI,1996:958). Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain disekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat.

Ilmu sosial dasar bukanlah suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah suatu pengetahuan mengenai aspek-aspek yang paling dasar yang ada dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan masalah-masalah yang terwujud daripadanya. (Moenandar 2001: 8)

Pemikiran Weber cukup relevan untuk kondisi masyarakat Indonesia saat ini, sebagaimana di ketahui ilmu sosial mempunyai perhatian pada masalah kehidupan manusia (individu), kehidupan masyarakat dan berbagai prakonsepsi tentang disiplin ilmu sosial. Perkembangan ilmu sosial berkaitan dengan sistem berpikir, dimana teori dan asumsi yang mendasar senantiasa dalam konteks sejarah dan biografi. (Moenandar 2001: 36)

Pendekatan struktural fungsional memandang masyarakat sebagai suatu sistem secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk keseimbangan, sehingga sering di sebut pula pendekatan tertib sosial, pendekatan integrasi atau pendekatan keseimbangan. (Hartomo 2001: 194)

2.3.2. Ekonomi

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*oikos*” yang artinya rumah tangga dan “*nomos*” yang artinya mengatur, jadi secara harafiah ekonomi berarti cara mengatur rumah tangga. Secara konsep ekonomi adalah kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan keperluan (kebutuhan dan keinginan) hidupnya. Dengan demikian, secara konseptual hampir semua aktivitas manusia terkait dengan ekonomi, karena semua aktivitas manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan dalam kehidupannya.

Di sisi lain, terlihat bahwa apa pun profesi dan pekerjaan seseorang, tujuannya tidak lepas dari pemenuhan keperluan hidup, baik untuk sekarang maupun masa datang, baik untuk keperluan sendiri maupun orang lain. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan investasi, produksi, konsumsi, serta distribusi barang dan jasa. Kegiatan ekonomi, pada dasarnya di mulai dengan kegiatan investasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apa pun profesi manusia dalam mencapai kesejahteraan (mencukupi keperluan hidupnya) akan berkaitan dengan kegiatan ekonomi. (Apridar 2010:1)

Ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini didasarkan dari asal kata ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* adalah rumah tangga dan *nomos* berarti ilmu. Dari gabungan kata tersebut, terbentuklah pengertian ekonomi. Dimana dalam pengertian tersebut, menunjukkan sebuah kondisi yang merujuk pada pengertian tentang aktivitas manusia. Khususnya pada

usaha untuk bisa mengolah sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya, sebagai alat pemenuh kebutuhan hidup. (Apridar 2010: 4)

Dalam kajian ilmu pengetahuan, ekonomi dimasukkan ke dalam bagian ilmu-ilmu sosial. Hal ini karena ekonomi terkait dengan masalah manusia yang merupakan pokok bahasan dalam kajian ilmu sosial.

Lima kebutuhan dasar manusia. yaitu:

a. Kebutuhan Fisiologis

Contohnya adalah : Sandang / pakaian, pangan / makanan, papan / rumah, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya.

b. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan

Contoh seperti : Bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan lain sebagainya.

c. Kebutuhan Sosial

Misalnya adalah : memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain

d. Kebutuhan Penghargaan

Contoh : pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan banyak lagi lainnya.

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Adalah kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya. (Apridar 2010:6)

Setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dinamakan kegiatan ekonomi. Bagaimanakah pola perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi? Untuk mengetahui pola perilaku konsumen dan produsen kita perlu memerhatikan semua kegiatan ekonomi masyarakat.

Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi.

a. Produksi

Produksi adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian yang lebih luas, produksi didefinisikan sebagai setiap tindakan yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah 'nilai' guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, tidak semua kegiatan/ proses produksi adalah berupa perubahan bentuk suatu barang.

b. Distribusi

Pada dasarnya perdagangan merupakan kegiatan distribusi karena distribusi merupakan kegiatan utama dalam sebuah sistem perdagangan. Dalam pelaksanaan distribusi terdapat beberapa badan yang berhubungan langsung. Mulai dari agen, makelar, komisioner, importir, eksportir, pedagang besar (grosir), sampai dengan pedagang eceran. Sedangkan cara yang digunakan untuk menyalurkan barang

dan jasa tersebut dibedakan menjadi sistem distribusi langsung, sistem distribusi semua langsung, dan sistem distribusi tidak langsung.

c. Konsumsi

Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda (barang dan jasa) dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Namun demikian, kita harus berhati-hati dalam menentukan apakah suatu kegiatan dalam menggunakan suatu benda tersebut termasuk ke dalam lingkup konsumsi atau tidak. (Hartomo,dkk 2001:285)

2.3.3. Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat. Pemberian posisi ini disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sipembawa status misalnya, pendapatan, dan pekerjaan.

Dari Pengertian Di atas dapat diambil pengertian bahwa Sosial ekonomi sebagai studi tentang bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka. Dari definisi tersebut dapat diuraikan bahwa sosial ekonomi berhubungan dengan dua hal yaitu :

1. Fenomena ekonomi yaitu gejala bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka. Cara yang dimaksud di sini berkait dengan semua

aktivitas orang dan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi jasa-jasa dan barang-barang langka.

2. Pendekatan sosial yaitu berupa kerangka acuan, variabel-variabel, dan model-model yang digunakan oleh para sosiolog dalam memahami dan menjelaskan kenyataan sosial atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. (Damsar 2002:7-8)

Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat pembeda posisi atau kedudukan seseorang maupun kelompok di dalam struktur sosial tertentu. Perbedaan kedudukan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah lapisan sosial. Lapisan sosial merupakan sesuatu yang selalu ada dan menjadi ciri yang umum di dalam kehidupan manusia.

Yudi (2002:22) mendefinisikan status sosial bahwa hal tersebut merupakan kedudukan seseorang di masyarakat, di mana didasarkan pada pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara vertikal, yang di wujudkan dengan adanya tingkatan masyarakat dari yang tinggi ke yang lebih rendah dengan mengacu pada pengelompokkan menurut kekayaan Kelas sosial biasa digunakan hanya untuk lapisan berdasarkan unsur ekonomis. Diantara lapisan atasan dengan yang terendah, terdapat lapisan yang jumlahnya relatif banyak. Biasanya lapisan atasan, tidak hanya memiliki satu macam saja apa yang dihargai oleh masyarakat. Akan tetapi kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya, mereka yang mempunyai uang lebih banyak, akan lebih mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan dan mungkin juga kehormatan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya kelas sosial ekonomi adalah status atau kedudukan seseorang di masyarakat, di mana berdasarkan pada pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara vertikal, yang diwujudkan dengan adanya tingkatan masyarakat dari yang tinggi ke yang rendah dengan mengacu pada pengelompokan menurut kekayaan.

Dalam lingkungan masyarakat kita melihat bahwa ada pembeda-bedaan yang berlaku dan diterima secara luas oleh masyarakat Di sekitar kita ada orang yang menempati jabatan tinggi seperti gubernur dan walikota dan jabatan rendah seperti camat dan lurah. Di sekolah ada kepala sekolah dan ada staf sekolah. Di RT atau RW kita ada orang kaya, orang biasa saja dan ada orang miskin.

Untuk melihat kedudukan sosial ekonomi Melly G. Tan mengatakan adalah pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi (Koentjaraningrat, 1981:35(dalam website)). Selanjutnya Soekanto (dalam website) mengatakan bahwa Status sosial ekonomi merupakan suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat, pemberian posisi ini disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang hanya dipenuhi sipembawa statusnya, misalnya: pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan.

a. Pekerjaan

Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah, berupa barang dan jasa akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuannya, untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam bekerja mengandung dua segi, kepuasan jasmani dan terpenuhinya kebutuhan hidup.

Dalam kaitan ini Sukanto (2003:33) memberikan definisi mengenai pekerjaan sebagai berikut: Pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa bagi diri sendiri atau orang lain, baik orang melakukan dengan dibayar atau tidak.

b. Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memiliki pendidikan yang cukup maka seseorang akan mengetahui mana yang baik dan mana yang dapat menjadikan seseorang menjadi berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang membutuhkannya.

Adapun pengertian pendidikan yang lebih jelas, dapat dilihat dalam pengertian-pengertian pendidikan yang diungkapkan oleh beberapa pakar pendidikan sebagai berikut. Pendidikan menurut Soekanto (2003:33): “Pendidikan merupakan suatu alat yang akan membina dan mendorong

seseorang untuk berfikir secara rasional maupun logis, dapat meningkatkan kesadaran untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya (seefektif dan seefisien mungkin) dengan menyerap banyak pengalaman mengenai keahlian dan keterampilan sehingga menjadi cepat tanggap terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah upaya untuk mengarah pada tercapainya perkembangan yang dapat merangsang suatu cara berfikir yang rasional, kreatif dan sistematis. Dengan pendidikan dapat memperluas keilmuan, meningkatkan kemampuan dan potensi serta membuat seseorang lebih peka terhadap setiap gejala-gejala sosial yang muncul.

c. Pendapatan

Pendapatan akan mempengaruhi status sosial seseorang, terutama akan ditemui dalam masyarakat yang materialis dan tradisional yang menghargai status sosial ekonomi yang tinggi terhadap kekayaan. Christopher mendefinisikan pendapatan berdasarkan kamus ekonomi adalah uang yang diterima oleh seseorang dalam bentuk gaji, upah sewa, bunga, laba dan lain sebagainya.

2.4. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* yaitu: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2001:65).

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132).

Jadi Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis.

Faktor- faktor tersebut diantaranya:

- a. Kondisi lingkungan, Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.
- b. Hubungan antar organisasi, Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program, Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. (Subarsono, 2005:101).

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan.

Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang berbeda-beda yang mempengaruhi bentuk dan lingkungannya.

2.5. Pengertian peranan

Peran (Zakir 2011: 30) ialah sesuatu yang dapat diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Selanjutnya menurut Biddle dan Thomas (Taufiq 2013:4) peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Selanjutnya Peranan (Soekanto 2001:27) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Selanjutnya menurut Ndraha peranan diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dan atau telah ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa , peranan dapat diartikan sebagai kumpulan harapan tentang rencana dari seseorang atau kelompok yang mempunyai status dalam masyarakat, dengan kata lain peranan dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan status atau kedudukannya dalam masyarakat.

Seseorang dikatakan berperan apabila dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran dan kewajibannya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seseorang juga dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan yang baru. (Zakir 2011 : 30)

2.6. Program Kemitraan Bina Lingkungan PT P Nusantara V

PKBL pada dasarnya adalah wujud kepedulian perusahaan terhadap kondisi masyarakat sekitar, khususnya untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan koperasi dari laba disisihkan. Melalui PKBL, perusahaan merasa terpanggil untuk turut memberdayakan masyarakat sekitar dengan mendorong kegiatan produktif dan perluasan kesempatan berusaha sehingga dapat diperoleh kemajuan bersama. PKBL memungkinkan hubungan antara perusahaan dan masyarakat menjadi lebih harmonis. (Laporan Manajemen PKBL 2012:1)

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan PT.Perkebunan Nusantara V adalah program untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan/perbaikan kondisi sosial masyarakat sebagai

wujud kepedulian BUMN di sekitar wilayah kerja, khususnya untuk daerah sekitar kebun yang terletak di Kabupaten/Kota Propinsi Riau.

2.6.1. Dasar Hukum PKBL PT. Perkebunan Nusantara V

Pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No: 1232/KMK.013/1989. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama program Pegelkop (Pembina pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 316/KMK.016/1994 nama program diganti menjadi program PUKK (Pembina Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan – peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 nama program diganti menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (disingkat PKBL)

2.6.2. Maksud dan Tujuan Didirikannya Unit PKBL

PKBL PTPN V berdomisili di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru – Riau, maksud dan tujuan didirikannya Unit PKBL adalah :

- a. Merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan Corporate social Responsibility (CSR). Dengan pelaksanaa PKBL diharapkan hubungan dengan para stakeholders menjadi baik dan langgeng sehingga kelangsungan usaha perusahaan dapat terjaga.

- b. Untuk meningkatkan taraf hidup Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi yang pada gilirannya mampu mengurangi kesenjangan sosial sekaligus dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis.
- c. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara PT Perkebunan Nusantara V, dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi & UKM dan saling menunjang didalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan yang efektif dan dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat dilingkungan wilayah kerja Perusahaan serta terwujud ekonomi kerakyatan tanpa mengabaikan peran usaha dari Perusahaan.
- d. Membantu masyarakat setempat yang berdomisili disekitar lingkungan wilayah kerja perusahaan.
- e. Perbaiki kualitas SDM masyarakat disekitar lingkungan Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.(Laporan Manajemen PKBL PTPN V, 2012:2)

2.6.3. Program Kemitraan (PK)

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, dalam rangka meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Program Kemitraan ini memberikan pinjaman modal kerja kepada masyarakat dengan jumlah bunga yang relatif kecil yaitu 6%.

Program Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara V tidak hanya memberikan pinjaman kemitraan untuk modal kerja dan investasi dengan suku bunga, persyaratan dan jaminan pinjaman yang ringan. Tetapi perusahaan juga memberikan bantuan pembinaan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pemasaran

yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Mitra Binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi usaha mikro dan kecil (UMK) yang dijalankan masyarakat, sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Melalui program ini maka setiap UMK yang telah berkembang diharapkan juga bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal, sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Dengan demikian masyarakat sekitar yang tidak bisa bekerja di lingkungan perusahaan, tetap bisa merasakan manfaat dari kehadiran Perusahaan.

Adapun dana program Kemitraan diberikan dalam bentuk :

1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan
2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan
3. Beban pembinaan yaitu untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan, beban bersifat hibah, dan beban hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan. (Peraturan Menteri BUMN Pasal 11)

Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan sebagai berikut :

- a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan

kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:

1. Nama dan Alamat Unit Usaha
 2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha
 3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus
 4. Bidang Usaha
 5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang
 6. Perkembangan kinerja usaha
 7. Rencana Usaha dan Kebutuhan Dana
- b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan
- c. Calon Mitra Binaan yang layak Bina menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur Bersangkutan
- d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan
 - b. Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan BUMN Penyalur tau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan
 - c. Jumlah Pinjaman dan peruntukannya

- d. Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsura pokok dan juga administrasi pinjaman)
- e. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon mitra binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga penyalur lain.

Adapun besarnya jasa administrasi pinjaman dan dana program Kemitraan per tahun sebesar 6% dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh menteri. Apabila pinjaman diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6% atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud. Apabila pinjaman diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan maksimal 50% (50:50) (Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007).

2.6.4. Bina Lingkungan (BL)

Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Obyek Bantuan yang dapat diberikan bantuan dana Program Bina Lingkungan adalah Korban Bencana Alam, Pendidikan dan atau Pelatihan, Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum, Bantuan Sarana Ibadah serta Pelestarian Alam. (Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007)

2.7. Masyarakat

Masyarakat juga sering dikenal dengan istilah *society* yang berarti sekumpulan orang yang membentuk sistem, yang terjadi komunikasi didalam kelompok tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Masyarakat merupakan salah satu satuan sosial yang membentuk sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia. Istilah inggrisnya adalah *society* , sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab *Syakara* yang berarti ikut serta atau partisipasi, kata Arab masyarakat berarti saling bergaul yang istilah ilmiahnya berinteraksi.

Dalam masyarakat terjadi proses interaksi sosial, Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat bersifat primer dan sekunder. (Soerjono 2007: 64-67).

Masyarakat awal mulanya terbentuk dari masyarakat kecil yang artinya sekumpulan orang. Misalnya sebuah keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga, kemudian dari kelompok keluarga akan membentuk sebuah RT dan RW hingga akhirnya membentuk sebuah dusun. Dusun pun akan membentuk Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Hingga akhirnya negara. (Soerjono 2007: 199).

Masyarakat tidak akan pernah terbentuk tanpa adanya seorang pemimpin. seorang pemimpin yang akan memimpin sebuah masyarakat bisa dipilih dengan berbagai cara. Seperti Pemilu, Pemilihan secara tertutup hingga keturunan

pemimpin. Pemilihan pemimpin suatu daerah pasti sudah memiliki aturan masing masing yang biasa disebut adat istiadat.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul, “ Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa peranan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang dalam upaya meningkatkan usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang dalam upaya meningkatkan usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola PNPM Mandiri Pedesaan dan seluruh nasabah PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang yaitu sebanyak 540 orang. Sedangkan sebagai sampelnya penulis mengambil sebanyak 10% atau 54 orang nasabah ditambah dengan 5 orang pengelola PNPM Mandiri Pedesaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara dan angket yang diambil dari lokasi penelitian, ditambah dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai peranan yang sangat penting

terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Bangkinang seberang. Program yang berperan langsung dalam peningkatan UMKM ini adalah Simpan Pinjam Khusus Perempuan. Hal ini terbukti, 45 orang atau 83% responden dari angket yang disebarakan menyatakan bahwa PNPM Mandiri Pedesaan yang dicanangkan oleh pemerintah sangat baik terutama dalam hal peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah.

2.9. Pandangan Islam

Berdasarkan perspektif Islam, sebuah pandangan duniawi tidak terbatas pada pandangan dan pemikiran dari dunia fisik yang termasuk aspek sejarah, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang direfleksikan di dalamnya. Kehidupan manusia tidak akan lepas dari nilai-nilai normatif yang berkembang di dalam kehidupan sosialnya. Termasuk dalam kegiatan berekonomi maka sistem ekonomi yang ada seharusnya melihat keterkaitan nilai-nilai normatif tersebut dalam kehidupan dimana nilai-nilai tersebutlah yang kemudian akan menentukan kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat (Apridar 2010 : 6-7).

Salah satu karakteristik dalam islam adalah menganggap bahwa harta mutlak milik Allah sehingga dengan demikian posisi manusia terhadap harta hanyalah sebagai pemegang amanah yang dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. sebagaimana Firman Allah yang berbunyi dalam surat Ali-Imran ayat 109 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

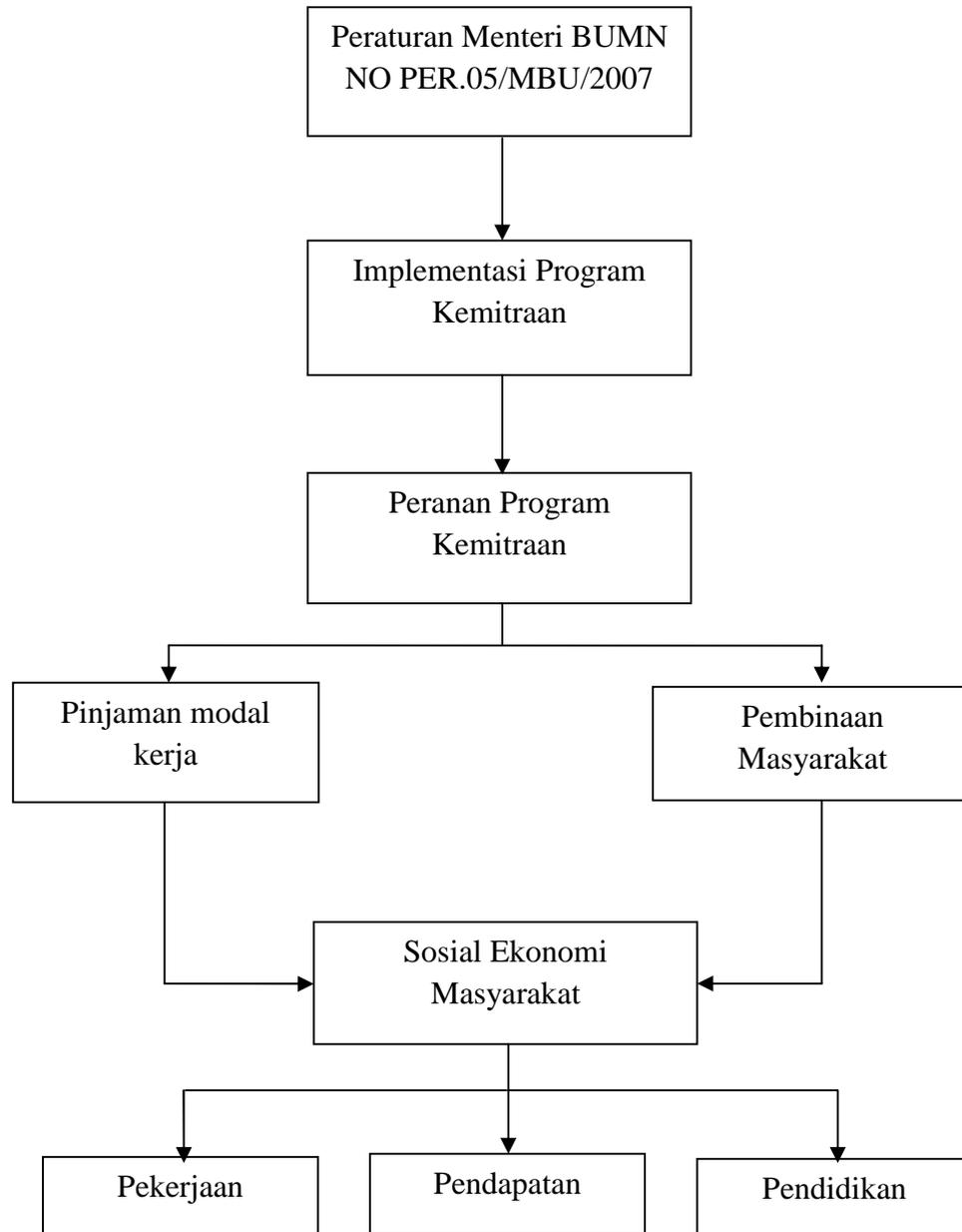
Artinya: *“kepunyaan Allah lah segala yang ada dilangit dan dibumi, dan kepada Allah lah kita dikembalikan segalan urusan.”(Ali-Imran:38)*

Di dalam ajaran agama Islam anjuran untuk saling tolong menolong adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia bahkan sangat dianjurkan terutama sekali tolong-menolong dalam hal kebaikan. Demikian juga halnya tolong menolong dalam memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَلَا تَقْوَىٰ ۖ ...
سَدِيدٌ

Artinya :“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat besar siksaan-Nya.” (Al-Maidah : 2)

2.10. Kerangka Pemikiran



2.11. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah informasi ilmiah yang membantu peneliti dengan menggunakan suatu variabel atau dengan kata lain konsep operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana mengukur suatu variabel.

2.11.1. Definisi Konsep

Konsep merupakan unsur penting dalam penelitian. Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Konsep penelitian sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kekacauan atau kesalah pahaman yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Untuk lebih mengetahui pengertian mengenai konsep-konsep yang digunakan, maka dibatasi konsep yang akan digunakan sebagai berikut :

- a. Peranan adalah sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan status atau kedudukannya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peranan didefinisikan yaitu Peran Program Kemitraan PT. P Nusantara V.
- b. Program Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara V adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil, melalui pinjaman kemitraan untuk modal kerja untuk peningkatan usaha dan pertumbuhan ekonomi. Program Kemitraan ini didefinisikan sebagai pemberian bantuan pinjaman dan pembinaan berupa bantuan pelatihan, penyuluhan dan bantuan pemasaran (promosi/pameran).
- c. Sosial Ekonomi adalah bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sosial ekonomi ini didefinisikan yaitu peningkatan pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan.

- d. Masyarakat merupakan salah satu satuan sosial yang membentuk sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia. Dimana masyarakat didefinisikan adalah masyarakat yang diberikan bantuan pinjaman oleh Program Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara V.

2.11.2. Variabel Penelitian

Dalam Penelitian Peranan Program Kemitraan Bina Lingkungan PT.PN V dalam meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar yang menjadi variabel penelitiannya yaitu : sosial ekonomi dengan indikatornya yaitu pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan.